



Article

PERAN EKONOMI PERTAHANAN DALAM MENDUKUNG PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA

Fhaji Akbar Putra¹, Sri Sundari², Suwito³

¹ Universitas Pertahanan Republik Indonesia, Bogor, Indonesia;
email : fhajiakbarputra@gmail.com

² Universitas Pertahanan Republik Indonesia, Bogor, Indonesia;
email : sri.sundari@idu.ac.id

³ Universitas Pertahanan Republik Indonesia, Bogor, Indonesia;
email : suwitoaau@gmail.com

ABSTRACT

Defense economics plays a strategic role in supporting a country's economic growth, not only by enhancing security but also by stimulating innovation, job creation, and strengthening domestic industries. This study aims to analyze how defense economics contributes to national economic growth, utilizing Bidle and Thomas's role theory, which includes three main aspects: role behavior, role conflict, and role ambiguity. The findings show that the government's behavior in defense budget allocation can support economic growth; however, its effectiveness depends on transparency and efficient budget management. Role conflict arises when the defense budget competes with other public sector needs, such as health and education, highlighting the importance of balance in budget allocation. Additionally, role ambiguity in defense economic policy creates uncertainty in objectives, indicating a need for improved planning and inter-agency coordination. By addressing these three aspects, defense economics can optimally contribute to sustainable economic growth and societal welfare.

ABSTRAK

Ekonomi pertahanan memainkan peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi suatu negara, tidak hanya melalui peningkatan keamanan tetapi juga melalui stimulasi inovasi, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan industri domestik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana ekonomi pertahanan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, dengan menggunakan teori peran Bidle dan Thomas, yang mencakup tiga aspek utama: perilaku peran, konflik peran, dan ambiguitas peran. Temuan penelitian menunjukkan bahwa perilaku pemerintah dalam alokasi anggaran pertahanan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi; namun, efektivitasnya bergantung pada transparansi dan pengelolaan anggaran yang efisien. Konflik peran muncul ketika anggaran pertahanan bersaing dengan kebutuhan sektor publik lainnya, seperti kesehatan dan

KEYWORDS

Defense economics, Economic growth, Role ambiguity, Role behavior, Role conflict

KATA KUNCI

Ambiguitas peran, ekonomi pertahanan, konflik peran, pertumbuhan ekonomi, perilaku peran

Copyright

© The Author(s) 2025



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

pendidikan, yang menggarisbawahi pentingnya keseimbangan dalam alokasi anggaran. Selain itu, ambiguitas peran dalam kebijakan ekonomi pertahanan menciptakan ketidakpastian dalam tujuan, yang mengindikasikan perlunya peningkatan perencanaan dan koordinasi antarlembaga. Dengan menangani ketiga aspek tersebut, ekonomi pertahanan dapat berkontribusi secara optimal terhadap pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat.

PENDAHULUAN

Ekonomi pertahanan merupakan salah satu komponen penting dalam strategi pembangunan nasional yang melibatkan pengalokasian sumber daya negara untuk mempertahankan stabilitas dan keamanan nasional (Ariani et al., 2023). Dalam konteks global yang semakin dinamis dan penuh ketidakpastian, peran sektor pertahanan kian menjadi sorotan, terutama dalam kaitannya dengan dampak ekonomi yang ditimbulkannya. Belanja pertahanan tidak hanya bertujuan untuk menjaga keamanan, tetapi juga berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui mekanisme penciptaan lapangan kerja, pengembangan teknologi, dan peningkatan infrastruktur (Ghozali et al., 2024). Kontribusi ekonomi pertahanan ini, meski kadang tidak disadari, memiliki potensi besar untuk mendorong kemajuan ekonomi suatu negara (Afrianto, 2023). Tetapi yang perlu jadi perhatian sumber pembiayaan untuk belanja kebutuhan pertahanan menjadi salah satu kunci utama apakah pengeluaran militer akan memiliki pengaruh atau tidak terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan membangun militer yang dibiayai oleh defisit dan bukan membangun militer yang dibiayai dengan cara meningkatkan pendapatan pajak, menyebabkan ledakan ekonomi dalam jangka pendek dan menengah serta kehancuran ekonomi dalam jangka panjang di Amerika Serikat selama perioda pasca-perang dunia II (Oatley, 2015 dalam Carter et al., 2021)

Namun dibalik kontribusi serta peluang pertumbuhan ekonomi dari sisi ekonomi pertahanan masih terdapat tantangan yang pasti dihadapi oleh setiap negara adalah bagaimana mengelola peran ekonomi pertahanan agar memberikan manfaat maksimal tanpa mengorbankan sektor publik lainnya seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial (Pambudhi, 2024). Dalam konteks Indonesia, investasi di sektor pertahanan sering kali menimbulkan pro dan kontra, terutama terkait dengan besarnya anggaran yang dialokasikan. Anggaran ini tidak hanya berfungsi untuk pengadaan alutsista (alat utama sistem persenjataan) atau peningkatan kapasitas militer, tetapi juga untuk mendukung industri-industri dalam negeri yang terkait dengan pertahanan. Misalnya, perusahaan yang bergerak di bidang

pembuatan senjata, kendaraan tempur, atau teknologi pertahanan lainnya dapat menciptakan lapangan kerja baru dan mengurangi ketergantungan pada impor (Amarilia et al., 2023).

Selain itu, pengeluaran pemerintah di sektor pertahanan juga dapat memicu *economic multiplier effect*, di mana peningkatan investasi di bidang ini menghasilkan dampak ekonomi berantai yang mempengaruhi sektor-sektor lain (Wahyuningsi et al., 2024). Secara tidak langsung, peningkatan belanja militer menstimulasi ekonomi dengan mendorong subkontraktor pertahanan untuk meningkatkan tenaga kerja dan penggajian mereka serta menaikkan gaji anggota militer, yang memberi mereka lebih banyak uang untuk dibelanjakan (DeRouen-Heo, 2000 dalam Carter et al., 2021). Sebagai contoh, pengembangan teknologi militer dapat mendorong kemajuan di bidang teknologi sipil, seperti teknologi informasi, material komposit, dan manufaktur canggih, yang pada akhirnya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi (Susdarwono & Anis, 2020).

Namun demikian, pengalokasian anggaran untuk pertahanan kerap kali menimbulkan dilema bagi pemerintah, khususnya dalam konteks negara berkembang. Tingginya anggaran pertahanan dapat memunculkan permasalahan karena anggaran tersebut dapat digunakan untuk sektor lain yang dianggap lebih mendesak, seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur (Saifuddin, 2021). Istilah yang sering disebut senjata dan mentega sering kali menjadi pertimbangan karena saat anggaran untuk senjata ditingkatkan pasti akan mengurangi anggaran mentega. Pertukaran senjata melawan mentega kemudian menyiratkan bahwa anggaran militer yang terus meningkat harus diimbangi dengan penurunan proporsional dalam pengeluaran sosial (Carter et al., 2021). Inilah yang disebut sebagai *trade-off* dalam kebijakan fiskal, di mana pemerintah harus membuat keputusan sulit mengenai alokasi sumber daya yang terbatas. Konflik kepentingan ini sering kali menyebabkan perdebatan antara pihak-pihak yang mendukung peningkatan anggaran pertahanan dan pihak yang lebih memilih alokasi anggaran untuk sektor kesejahteraan sosial. Konflik ini menjadi tantangan besar dalam kebijakan ekonomi pertahanan, terutama dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan pertahanan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Dalam menilai dampak ekonomi pertahanan terhadap pertumbuhan ekonomi, penting untuk menggunakan pendekatan teoritis yang mampu menangkap kompleksitas interaksi antara berbagai peran yang ada dalam sistem pertahanan nasional (Ali et al., 2021). Salah satu pendekatan yang relevan adalah teori peran yang dikembangkan oleh Bidle dan Thomas. Teori ini berfokus pada ekspektasi peran dalam suatu organisasi atau sistem yang, jika tidak dikelola dengan baik, dapat menimbulkan tiga masalah utama: perilaku peran, konflik peran, dan ambiguitas peran. Ketiga aspek ini sangat relevan dalam konteks ekonomi pertahanan, di mana berbagai peran dalam

pengelolaan anggaran dan kebijakan pertahanan dapat saling bertentangan atau tumpang tindih, menyebabkan tantangan tambahan bagi pemerintah.

Dalam konteks ekonomi pertahanan, perilaku peran mengacu pada bagaimana pemerintah bertindak dalam pengelolaan anggaran pertahanan. Pemerintah diharapkan mampu mengalokasikan anggaran pertahanan secara efektif untuk mencapai tujuan strategis, yaitu meningkatkan keamanan nasional sambil mendukung pertumbuhan ekonomi. Dalam praktiknya, perilaku pemerintah dalam pengelolaan anggaran pertahanan akan berdampak pada banyak sektor, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sebagai contoh, pemerintah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan belanja di sektor teknologi militer yang dapat menginspirasi inovasi di sektor sipil. Namun, perilaku yang kurang tepat, seperti pengeluaran yang berlebihan atau kurang transparan, dapat menyebabkan inefisiensi dan mengurangi dampak positif yang seharusnya dihasilkan.

Sedangkan konflik peran dalam ekonomi pertahanan terjadi ketika prioritas anggaran pertahanan berbenturan dengan kebutuhan sosial lainnya (Nurhuda et al., 2021). Misalnya, di satu sisi, pemerintah memiliki kewajiban untuk memastikan pertahanan yang kuat dan stabil, tetapi di sisi lain, kebutuhan sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan juga membutuhkan anggaran yang besar. Konflik ini menjadi semakin kompleks ketika menghadapi situasi ekonomi yang terbatas, di mana pilihan harus dibuat antara investasi untuk sektor pertahanan atau sektor publik lainnya. Konflik peran ini sering kali menjadi isu utama dalam pembahasan anggaran nasional, karena keputusan alokasi anggaran yang tidak seimbang dapat menyebabkan ketidakpuasan di masyarakat dan memengaruhi persepsi publik terhadap pemerintah.

Di sisi lain ambiguitas peran muncul ketika tujuan dan prioritas dalam kebijakan ekonomi pertahanan tidak jelas atau tidak terkoordinasi dengan baik. Ambiguitas ini dapat mengakibatkan ketidakpastian dalam implementasi kebijakan, yang pada akhirnya menghambat pencapaian tujuan strategis (Asyhadi et al., 2024). Dalam konteks ekonomi pertahanan, ambiguitas ini dapat tercermin dalam ketidakjelasan antara prioritas keamanan dan ekonomi, seperti kebingungan dalam memprioritaskan anggaran antara teknologi militer dan inovasi sipil. Ambiguitas peran ini sering kali menyebabkan kebijakan ekonomi pertahanan tidak mencapai hasil yang optimal dan bahkan menimbulkan dampak negatif bagi perekonomian secara keseluruhan.

Dengan menggunakan pendekatan teori peran Bidle Thomas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana ekonomi pertahanan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi serta tantangan-tantangan yang timbul terkait perilaku peran, konflik peran, dan ambiguitas peran. Hasil

penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan yang lebih mendalam tentang pentingnya kebijakan ekonomi pertahanan yang seimbang dan berkelanjutan, agar tidak hanya memberikan dampak positif bagi keamanan nasional tetapi juga bagi pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi masukan bagi para pembuat kebijakan dalam merancang kebijakan pertahanan yang lebih adaptif terhadap perubahan ekonomi global dan kebutuhan dalam negeri.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menganalisis peran ekonomi pertahanan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional berdasarkan teori peran Bidle Thomas. Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam interaksi kebijakan ekonomi pertahanan dalam konteks perilaku peran, konflik peran, dan ambiguitas peran yang terjadi. Desain penelitian deskriptif kualitatif dianggap sesuai untuk mengidentifikasi dan menginterpretasikan berbagai dinamika yang terjadi dalam pengelolaan kebijakan ekonomi pertahanan, dengan fokus pada efektivitas alokasi anggaran, potensi konflik kepentingan, dan ketidakjelasan tujuan yang mungkin muncul dalam proses kebijakan. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder yang meliputi laporan anggaran negara, laporan tahunan kementerian pertahanan, serta publikasi terkait investasi dan pengeluaran di sektor pertahanan. Selain itu, literatur ilmiah, jurnal akademik, dan artikel yang relevan dengan teori peran dan ekonomi pertahanan turut dilibatkan untuk memperkaya analisis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode *documentary research*, di mana laporan-laporan penting, kebijakan ekonomi terkait pertahanan, dan data anggaran dianalisis secara mendalam. Literatur akademik yang membahas teori peran Bidle Thomas juga digunakan untuk mengkaji dan membangun kerangka kerja penelitian.

Analisis data dilakukan dengan teknik analisis tematik yang meliputi pengkodean data, penyusunan tema, serta interpretasi dan penarikan kesimpulan. Tahap pertama, yaitu pengkodean data, dilakukan untuk mengorganisasikan informasi berdasarkan topik utama seperti perilaku peran, konflik peran, dan ambiguitas peran dalam konteks ekonomi pertahanan. Tahap selanjutnya adalah penyusunan tema, di mana tema-tema tersebut dikembangkan lebih lanjut untuk mengidentifikasi pola-pola utama dalam kebijakan ekonomi pertahanan. Akhirnya, data dianalisis dalam kaitannya dengan tujuan penelitian untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai peran ekonomi pertahanan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, sekaligus tantangan yang muncul dari aspek konflik dan ambiguitas peran. Dalam rangka memastikan validitas data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber. Dengan membandingkan data dari berbagai sumber, seperti laporan pemerintah, data statistik, dan literatur akademik,

penelitian ini diharapkan dapat mengurangi potensi bias interpretasi serta meningkatkan konsistensi hasil analisis. Pendekatan teori peran Bidle Thomas digunakan sebagai kerangka kerja utama dalam menganalisis tiga aspek penting: perilaku peran, konflik peran, dan ambiguitas peran. Teori ini memungkinkan peneliti untuk memahami bagaimana pemerintah berperan dalam pengelolaan ekonomi pertahanan, terutama terkait dengan efektivitas alokasi anggaran dan implementasi kebijakan. Selain itu, teori ini juga membantu mengidentifikasi konflik yang mungkin terjadi antara kebutuhan anggaran pertahanan dan sektor sosial lainnya serta menganalisis ketidakjelasan prioritas dalam kebijakan ekonomi pertahanan yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan strategis. Dengan kerangka teori ini, penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana ekonomi pertahanan dapat berkontribusi pada keamanan nasional sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbandingan Alokasi Anggaran Kementerian Pertahanan dengan Kementerian lain

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah alokasi dana yang diatur oleh pemerintah dan telah di setujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk mendukung berbagai kegiatan pemerintahan dalam satu tahun anggaran. Tujuan pembentukan APBN adalah untuk menjamin terciptanya keseimbangan dinamis dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, yang pada akhirnya mencapai peningkatan output, peningkatan kesempatan kerja, dan peningkatan produktivitas relatif (Putri et al.,2024). Berdasarkan Nota Keuangan APBN Tahun 2025, tren jangka panjang anggaran Kementerian Pertahanan menunjukkan kenaikan.

Tabel 1. Anggaran Belanja Kementerian Pertahanan 2020-2024 (milyar rupiah)

No	Tahun	Anggaran Belanja Kemhan
1	2020	136.871,4
2	2021	125.886,6
3	2022	150.438,8
4	2023	171.548,9
5	2024	175.112,7

(Sumber : Kemenkeu, 2025)

Anggaran Belanja Kementerian Pertahanan mengalami penurunan dari tahun 2020 ke 2021 sebesar 8,03% hal ini karena adanya *refocusing* anggaran pada masa Covid-19. Namun pada tahun 2022 anggaran meningkat 19,50% dan 14,03% pada tahun 2023 serta kembali meningkat 2,08% di tahun 2024. Besarnya anggaran yang diberikan kepada

Kementerian Pertahanan diharapkan dapat menjaga pertahanan dan kedaulatan negara. Dilihat dari data keuangan yang dianalisis anggaran pertahanan terbesar dibelanjakan untuk program penyelenggaraan manajemen dan operasional dari tiga matra darat, laut dan udara. Anggaran besar untuk manajemen dan operasional ini menunjukkan bahwa aspek administratif, logistik, serta infrastruktur pendukung mendapat perhatian besar karena hal ini penting untuk menjaga kelancaran operasional sistem pertahanan serta untuk memastikan program-program prioritas nasional dapat berjalan dengan baik. Pada program penelitian dan pengembangan kementerian pertahanan dana untuk riset dan pengembangan relatif kecil. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada dorongan untuk inovasi teknologi sendiri, sebagian besar anggaran masih difokuskan pada operasional dan pengadaan alutsista.

Jika kita bandingkan anggaran Kementerian Pertahanan dengan kementerian yang lain seperti Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan Kementerian Kesehatan, sektor pertahanan mendapatkan porsi anggaran yang lebih besar.

Tabel 2. Anggaran Belanja Kementerian Pertahanan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan Kementerian Kesehatan 2020-2024 (miliar rupiah)

No	Tahun	Kemhan	Kemendikbudristek	Kemenkes
1	2020	136.871,4	79.061,0	102.207,4
2	2021	125.886,6	84.705,0	208.317,7
3	2022	150.438,8	81.342,8	121.059,7
4	2023	171.548,9	80.716,8	94.567,1
5	2024	175.112,7	92.822,2	93.255,3

(Sumber : Kemenkeu, 2025)

Besarnya anggaran yang diberikan untuk sektor pertahanan merupakan salah satu bentuk komitmen pemerintah untuk memperkuat kemandirian industri pertahanan nasional dan meningkatkan kapasitas teknologi dalam negeri. Pertahanan dan keamanan negara merupakan hal yang wajib dijaga oleh negara sebab stabilitas pertahanan dapat menarik investasi dan menjamin kepastian ekonomi. Dari sudut pandang ekonomi mikro, barang publik yang wajib disediakan pemerintah adalah pertahanan nasional dan sistem hukum serta keduanya harus dibayarkan dari perbendaharaan publik (Putra et al.,2022).

Mahalnya biaya pengadaan dan perawatan alutsista dan non alutsista menjadi salah satu hal yang membuat sektor pertahanan mendapatkan anggaran yang lebih besar dari kementerian lainnya dan hal ini juga yang membuat pemerintah ingin mengejar industrialisasi pertahanan selain untuk mengatasi embargo senjata seperti yang sudah pernah dialami Indonesia ini juga salah satu upaya untuk mempercepat pembangunan kapasitas, menciptakan barang bernilai tambah yang tinggi, dan untuk memajukan dukungan kepada industri, manfaat ganda teknologi, penciptaan lapangan kerja, peningkatan ekspor, dan

peningkatan penyerapan teknologi yang akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Pamungkas et al., 2024).

Perilaku Peran

Perilaku peran dalam konteks ekonomi pertahanan mencerminkan bagaimana pemerintah bertindak dalam mengalokasikan dan mengelola anggaran pertahanan untuk mencapai tujuan keamanan sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi (Rusdiana et al., 2021). Berdasarkan analisis data, ditemukan bahwa pemerintah memiliki komitmen yang tinggi dalam mengalokasikan anggaran untuk sektor pertahanan dilihat dari besarnya anggaran yang selalu diberikan untuk sektor pertahanan selama 5 tahun terakhir dibandingkan sektor lainnya. Dampak dari pemberian anggaran pertahanan yang besar juga dalam waktu tertentu dapat memberikan efek positif terhadap perekonomian melalui penciptaan lapangan kerja, pengembangan teknologi, dan inovasi industri. Peningkatan pengeluaran militer lebih memberikan dampak pada pertumbuhan ekonomi untuk jangka panjang. (Carter et al., 2021) menemukan peningkatan belanja militer menyebabkan pertumbuhan PDB yang jauh lebih rendah pada tiga hingga enam bulan pertama setelah peningkatan dan kemudian pertumbuhan ekonomi yang jauh lebih tinggi dimulai sekitar satu tahun setelah peningkatan.

Peningkatan anggaran dalam sektor teknologi militer tidak hanya memenuhi kebutuhan persenjataan negara, tetapi juga menciptakan efek pengganda ekonomi dengan mendorong kemajuan teknologi di sektor sipil. Pengeluaran pemerintah di bidang ini sering kali berkontribusi pada inovasi yang berkelanjutan, terutama dalam teknologi tinggi seperti sistem komunikasi, elektronik, dan material komposit, yang kemudian dapat diaplikasikan pada industri non-pertahanan. Namun, perilaku pemerintah dalam pengelolaan anggaran pertahanan juga menunjukkan adanya beberapa kekurangan, terutama dalam aspek transparansi dan efisiensi penggunaan anggaran.

Sumber pembiayaan utama untuk pemenuhan kebutuhan sektor pertahanan juga menjadi salah hal yang penting dalam pertumbuhan ekonomi. Karena apabila pemenuhan sektor pertahanan lebih dominan menggunakan skema hutang maka ekonomi pertahanan berpotensi tidak akan berpengaruh dalam pertumbuhan ekonomi. Dalam beberapa kasus juga ditemukan bahwa anggaran pertahanan sering kali dialokasikan tanpa prioritas yang jelas atau tanpa perencanaan strategis yang tepat. Hal ini menyebabkan dana yang dikeluarkan tidak selalu memberikan dampak maksimal terhadap perekonomian nasional. Selain itu, kurangnya pengawasan yang ketat dalam implementasi anggaran dapat menyebabkan risiko penyalahgunaan dana yang pada akhirnya berdampak pada ketidakpercayaan publik terhadap kebijakan ekonomi pertahanan.

Pemerintah juga menunjukkan perilaku yang cenderung responsif terhadap situasi geopolitik global, yang kadang kala memicu pengeluaran besar di sektor pertahanan. Misalnya, adanya peningkatan ketegangan di kawasan Asia-Pasifik beberapa tahun terakhir mendorong pemerintah untuk memperbesar anggaran pertahanan demi meningkatkan kekuatan militer. Sementara langkah ini penting untuk menjaga stabilitas dan keamanan, dalam jangka panjang perilaku yang terlalu responsif dapat menyebabkan ketidakseimbangan anggaran, mengingat besarnya biaya yang harus dialokasikan untuk pertahanan di tengah kebutuhan ekonomi lainnya.

Selain itu, perilaku pemerintah dalam mendorong pengembangan industri pertahanan dalam negeri juga memberikan kontribusi signifikan. Dengan mengalokasikan sebagian anggaran pertahanan untuk pengembangan industri dalam negeri, seperti PT Pindad dan perusahaan industri pertahanan lainnya, pemerintah berusaha mengurangi ketergantungan pada impor alutsista (alat utama sistem persenjataan) dan menciptakan lapangan kerja local (Arsy Ash Shiddiqy et al., 2024). Langkah ini juga bertujuan untuk memperkuat daya saing industri pertahanan dalam negeri, yang pada gilirannya dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Namun, efektivitas dari perilaku ini bergantung pada sejauh mana pemerintah dapat memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan benar-benar digunakan untuk pengembangan industri lokal secara berkelanjutan dan tidak tergantung pada fluktuasi anggaran tahunan.

Perilaku peran pemerintah dalam ekonomi pertahanan menunjukkan bahwa kebijakan ini memiliki potensi untuk memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi jika dikelola secara transparan, efisien, dan strategis. Namun, diperlukan perbaikan dalam hal perencanaan anggaran, pengawasan, serta prioritas yang lebih jelas agar manfaat ekonomi pertahanan dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat

Konflik Peran

Konflik peran dalam ekonomi pertahanan mencerminkan ketegangan yang muncul ketika pemerintah harus memilih antara memenuhi kebutuhan keamanan nasional melalui alokasi anggaran pertahanan atau mengalokasikan anggaran tersebut untuk sektor-sektor publik lainnya (Irwanto, 2023), seperti kesehatan, pendidikan, dan pembangunan infrastruktur. Konflik ini menjadi semakin nyata dalam situasi di mana anggaran negara terbatas, sehingga keputusan mengenai prioritas pengeluaran menjadi tantangan besar. Berdasarkan analisis data, ditemukan bahwa peningkatan alokasi anggaran untuk sektor pertahanan sering kali berpotensi mengurangi anggaran yang seharusnya dialokasikan untuk sektor lain yang lebih mendesak bagi kesejahteraan masyarakat. Sebagai contoh, dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia telah meningkatkan anggaran untuk sektor pertahanan sebagai respons terhadap dinamika geopolitik dan kebutuhan untuk memperkuat pertahanan nasional.

Namun, peningkatan ini memunculkan konflik dengan kebutuhan di sektor pendidikan dan kesehatan, yang secara konsisten membutuhkan tambahan anggaran untuk perbaikan infrastruktur kesehatan, peningkatan kualitas layanan pendidikan, dan pemerataan akses bagi masyarakat. Dilihat dari data realisasi keuangan tahun 2024 Kementerian Pertahanan dengan total belanja 175,1 triliun rupiah menjadi yang tertinggi dibandingkan Kementerian lainnya. Di sektor Pendidikan yang bawahi oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dengan realisasi sebesar 92,8 triliun rupiah dan sektor Kesehatan pada Kementerian Kesehatan sebesar 93,2 triliun rupiah. Beberapa pihak mengkritik bahwa alokasi anggaran yang berlebihan untuk pertahanan dapat mengorbankan sektor-sektor publik yang langsung berdampak pada kualitas hidup masyarakat. Dalam konteks ini, konflik peran terjadi karena pemerintah dihadapkan pada keputusan yang sulit antara memastikan keamanan nasional dan meningkatkan kualitas hidup melalui investasi di sektor-sektor publik.

Selain itu, konflik peran ini juga terlihat pada tingkat kebijakan, di mana prioritas untuk pengembangan industri pertahanan dalam negeri sering kali menghambat pengalokasian dana untuk pengembangan sektor-sektor ekonomi lain yang memiliki potensi pertumbuhan tinggi. Kebijakan pemerintah yang memprioritaskan industri pertahanan, seperti pengembangan perusahaan milik negara di bidang teknologi militer, memicu ketegangan dalam pengalokasian anggaran untuk sektor industri lain yang juga memiliki peluang besar dalam mendorong perekonomian. Misalnya, investasi besar di industri pertahanan dapat mengurangi alokasi anggaran untuk sektor industri kreatif atau teknologi informasi yang juga memiliki potensi besar untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan daya saing nasional.

Konflik peran ini tidak hanya berdampak pada alokasi anggaran tetapi juga pada persepsi publik terhadap kebijakan ekonomi pertahanan. Masyarakat sering kali mempertanyakan apakah belanja besar di sektor pertahanan adalah pilihan yang tepat, terutama jika hal itu berarti pengurangan alokasi anggaran di sektor yang lebih mendesak bagi kesejahteraan rakyat. Dalam situasi seperti ini, muncul persepsi bahwa pemerintah lebih mengutamakan keamanan daripada kebutuhan sosial lainnya, yang dapat menimbulkan ketidakpuasan dan ketidakpercayaan di kalangan masyarakat. Persepsi ini menunjukkan bahwa konflik peran tidak hanya merupakan isu anggaran tetapi juga menjadi tantangan dalam menjaga dukungan publik terhadap kebijakan ekonomi pertahanan.

Selain itu, konflik peran juga sering kali dipicu oleh perbedaan kepentingan antara kementerian terkait, seperti kementerian pertahanan dan kementerian keuangan atau kementerian ekonomi. Setiap kementerian memiliki prioritas yang berbeda sesuai dengan misi dan tanggung jawabnya

masing-masing. Kementerian pertahanan mungkin menekankan pentingnya peningkatan anggaran untuk memperkuat kemampuan militer, sedangkan kementerian lain mungkin lebih fokus pada kebutuhan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Konflik antara prioritas ini sering kali menyebabkan terjadinya negosiasi yang panjang dan sulit dalam proses penganggaran, yang pada akhirnya dapat memperlambat implementasi kebijakan ekonomi secara keseluruhan. Konflik peran dalam ekonomi pertahanan menyoroti pentingnya keseimbangan dalam pengalokasian anggaran negara. Di satu sisi, keamanan nasional adalah kebutuhan yang tidak bisa diabaikan, tetapi di sisi lain, kesejahteraan masyarakat juga menjadi prioritas utama dalam pembangunan nasional. Pemerintah perlu mengelola konflik ini dengan bijak, memastikan bahwa kebijakan pertahanan yang diambil tidak mengorbankan sektor-sektor lain yang juga penting bagi pembangunan ekonomi dan sosial. Optimalisasi kebijakan ekonomi pertahanan memerlukan upaya untuk menyelaraskan kepentingan berbagai pihak yang terlibat, serta komunikasi yang transparan dengan masyarakat untuk menjaga dukungan publik terhadap kebijakan yang diambil.

Ambiguitas Peran

Ambiguitas peran dalam konteks ekonomi pertahanan mengacu pada ketidakjelasan dalam tujuan dan prioritas kebijakan ekonomi pertahanan, yang sering kali menimbulkan kebingungan dalam implementasi kebijakan serta menghambat pencapaian hasil yang diinginkan (Prihantoro & Swastanto, 2021). Berdasarkan analisis, ditemukan bahwa ambiguitas peran ini terutama terjadi ketika pemerintah tidak memiliki panduan atau sasaran yang jelas dalam menentukan apakah fokus utama ekonomi pertahanan adalah untuk peningkatan keamanan, penciptaan lapangan kerja, atau pengembangan teknologi.

Karena disatu sisi saat pemerintah hanya berfokus pada peningkatan keamanan dengan melakukan kerja sama dengan negara lain untuk pengadaan alutsista ini memang memberikan dampak positif terhadap peningkatan keamanan dan pengembangan teknologi karena pasti akan terjadi transfer of technology dan ini baik untuk pengembangan sumber daya manusia. Namun pengeluaran militer yang besar tentunya akan mengorbankan pengeluaran disektor lainnya seperti pendidikan. Hal ini sejalan dengan yang ditemukan (Mints-Huang, 1991 dalam Carter et al., 2021) bahwa pengeluaran militer yang lebih tinggi mengurangi pengeluaran jangka panjang untuk pendidikan dengan cara mengurangi investasi yang pada akhirnya mengurangi sumber daya yang tersedia untuk pengeluaran pendidikan. Ketidakjelasan ini menyebabkan tumpang tindih kebijakan antara kementerian atau lembaga yang bertanggung jawab atas aspek keamanan dan ekonomi, sehingga mengurangi efektivitas ekonomi pertahanan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Sebagai contoh, alokasi anggaran yang diarahkan untuk pengembangan

industri pertahanan dalam negeri kadang-kadang dilakukan tanpa strategi yang matang untuk memastikan keberlanjutan dan produktivitas industri tersebut. Ini mengakibatkan kebijakan yang diambil terkesan setengah hati dan tidak konsisten, di mana pada satu sisi ada upaya untuk mendorong kemandirian industri pertahanan, namun pada sisi lain masih terdapat ketergantungan pada produk atau teknologi asing karena keterbatasan dana dan teknologi dalam negeri. Ambiguitas dalam prioritas ini tidak hanya menghambat pertumbuhan industri lokal tetapi juga menghambat kontribusi ekonomi pertahanan secara keseluruhan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Selain itu, ambiguitas peran juga terlihat dalam perencanaan jangka panjang ekonomi pertahanan yang kadang tidak sejalan dengan tujuan pembangunan nasional. Misalnya, dalam upaya meningkatkan anggaran pertahanan untuk tujuan keamanan, pemerintah sering kali mengesampingkan kebutuhan koordinasi dengan kementerian ekonomi atau industri terkait yang memiliki pandangan berbeda tentang prioritas anggaran. Hal ini menyebabkan kebijakan ekonomi pertahanan tidak selalu terintegrasi dengan rencana pembangunan ekonomi secara menyeluruh. Akibatnya, ketidakjelasan ini menciptakan kebingungan bagi para pelaksana kebijakan dan industri pertahanan lokal, yang pada akhirnya berdampak pada pengalokasian sumber daya yang tidak efisien dan hasil yang tidak optimal. Ambiguitas peran ini juga berdampak pada persepsi publik dan dukungan masyarakat terhadap kebijakan ekonomi pertahanan. Ketika prioritas kebijakan tidak jelas atau tidak dikomunikasikan dengan baik, masyarakat cenderung meragukan efektivitas dari alokasi anggaran pertahanan yang besar, terutama jika hasilnya tidak terlihat secara langsung dalam jangka pendek. Kurangnya transparansi dalam menjelaskan tujuan ekonomi pertahanan dan bagaimana anggaran tersebut akan mendukung kesejahteraan publik menyebabkan munculnya keraguan mengenai relevansi kebijakan ini, terutama di tengah kebutuhan masyarakat akan sektor-sektor publik lainnya.

Di samping itu, ambiguitas peran juga muncul dalam hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam beberapa kasus, alokasi anggaran pertahanan yang lebih banyak berpusat di pemerintah pusat sering kali tidak disertai dengan panduan yang jelas mengenai peran pemerintah daerah dalam mendukung ekonomi pertahanan (Dzikri, 2016). Hal ini menyebabkan ketidakjelasan dalam pembagian peran dan tanggung jawab antara pemerintah pusat dan daerah, yang pada akhirnya mempersulit koordinasi dalam pelaksanaan kebijakan ekonomi pertahanan yang efektif di tingkat lokal. Ambiguitas peran dalam ekonomi pertahanan menunjukkan perlunya perencanaan yang lebih terstruktur dan komunikasi yang lebih transparan mengenai prioritas kebijakan. Pemerintah perlu menetapkan

sasaran yang jelas dan spesifik mengenai peran ekonomi pertahanan, baik sebagai pendukung keamanan nasional maupun sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan mengatasi ambiguitas ini, kebijakan ekonomi pertahanan dapat lebih terarah dan sinergis dengan tujuan pembangunan nasional secara keseluruhan, sehingga menghasilkan dampak yang lebih optimal baik dari sisi keamanan maupun kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Implikasi Temuan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ekonomi pertahanan memiliki potensi besar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, namun efektivitasnya sangat dipengaruhi oleh tiga aspek utama: perilaku peran, konflik peran, dan ambiguitas peran. Implikasi dari perilaku peran menunjukkan bahwa pemerintah perlu meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam alokasi anggaran pertahanan. Dengan mengelola anggaran secara strategis dan transparan, ekonomi pertahanan dapat menciptakan manfaat lebih besar, termasuk penciptaan lapangan kerja, pengembangan teknologi, dan penguatan industri lokal.

Transparansi yang ditingkatkan dalam pengelolaan anggaran pertahanan juga berpotensi meningkatkan kepercayaan publik terhadap kebijakan ekonomi pertahanan, sehingga mendukung stabilitas politik dan sosial yang lebih luas. Implikasi dari konflik peran menyoroti kebutuhan pemerintah untuk menyeimbangkan alokasi anggaran antara sektor pertahanan dan sektor publik lainnya. Ketika anggaran pertahanan meningkat tanpa mempertimbangkan keseimbangan dengan sektor kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur, terdapat risiko bahwa masyarakat akan merasa kebijakan pertahanan mengorbankan kebutuhan dasar mereka. Untuk itu, diperlukan kebijakan ekonomi pertahanan yang mampu memprioritaskan kebutuhan keamanan nasional tanpa mengabaikan kesejahteraan masyarakat. Strategi ini akan membantu pemerintah mempertahankan dukungan publik terhadap anggaran pertahanan yang besar dan menghindari ketegangan sosial akibat alokasi anggaran yang dianggap tidak adil.

Implikasi dari ambiguitas peran menekankan perlunya perencanaan yang jelas dan terkoordinasi antara kementerian dan lembaga terkait. Ketidakjelasan dalam tujuan dan sasaran kebijakan ekonomi pertahanan dapat menurunkan efektivitas implementasi kebijakan dan memunculkan ketidakefisienan dalam penggunaan sumber daya. Untuk mengatasi ambiguitas ini, pemerintah perlu menetapkan sasaran jangka pendek, menengah, dan panjang yang jelas serta mengkomunikasikannya kepada publik.

Dengan begitu, masyarakat dan pihak-pihak terkait akan memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai prioritas ekonomi pertahanan dan bagaimana anggaran tersebut berdampak pada keamanan dan kesejahteraan nasional. Koordinasi antara kementerian, khususnya kementerian pertahanan dan kementerian ekonomi, menjadi krusial agar kebijakan ekonomi

pertahanan dapat berjalan seiring dengan tujuan pembangunan nasional secara keseluruhan. Secara keseluruhan, temuan ini mengimplikasikan bahwa ekonomi pertahanan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi apabila dikelola dengan perencanaan yang matang, transparansi yang tinggi, dan keseimbangan yang tepat antara kebutuhan pertahanan dan publik. Kebijakan ekonomi pertahanan yang mempertimbangkan ketiga aspek ini akan memastikan bahwa sektor pertahanan tidak hanya menjadi pilar keamanan tetapi juga motor penggerak pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan langkah-langkah ini, pemerintah dapat memaksimalkan dampak positif ekonomi pertahanan sambil menjaga keseimbangan antara kebutuhan nasional yang bersifat strategis dan kesejahteraan masyarakat.

KESIMPULAN

Penelitian menyoroti pentingnya peran ekonomi pertahanan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi melalui analisis tiga aspek utama berdasarkan teori peran Bidle Thomas, yaitu perilaku peran, konflik peran, dan ambiguitas peran. Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa ekonomi pertahanan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penciptaan lapangan kerja, pengembangan teknologi, dan penguatan industri dalam negeri. Namun, efektivitas kontribusi ini sangat bergantung pada sumber pembiayaan untuk sektor pertahanan dan bagaimana pemerintah mengelola anggaran pertahanan secara efisien, transparan, dan strategis.

Perilaku pemerintah dalam mengalokasikan anggaran pertahanan perlu dilakukan secara bijak untuk memastikan bahwa belanja pertahanan benar-benar mendukung kebutuhan keamanan nasional sekaligus memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi. Konflik peran menjadi tantangan utama dalam ekonomi pertahanan, khususnya ketika alokasi anggaran untuk pertahanan berpotensi mengorbankan sektor publik lainnya, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Agar kebijakan ekonomi pertahanan tetap mendapatkan dukungan publik, diperlukan keseimbangan yang tepat antara kebutuhan pertahanan dan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, konflik peran antara berbagai kementerian juga menunjukkan pentingnya koordinasi yang lebih baik untuk memastikan bahwa ekonomi pertahanan tidak berdampak negatif terhadap pembangunan sektor lain yang esensial bagi kesejahteraan masyarakat. Ambiguitas peran dalam kebijakan ekonomi pertahanan menunjukkan bahwa pemerintah perlu menetapkan tujuan dan prioritas serta menentukan waktu yang jelas dalam pemenuhan kebutuhan pertahanan agar tidak terus mengorbankan sektor lainnya karena kemampuan keuangan yang terbatas. Ketidakjelasan dalam kebijakan dan tujuan ekonomi pertahanan dapat menyebabkan ketidakefisienan dalam

penggunaan sumber daya dan menimbulkan ketidakpercayaan publik. Dengan perencanaan yang lebih terstruktur dan koordinasi antar-lembaga yang lebih baik, ekonomi pertahanan dapat berjalan sinergis dengan tujuan pembangunan nasional dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Secara keseluruhan, ekonomi pertahanan memiliki potensi besar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi apabila dikelola dengan transparansi, efisiensi, dan keseimbangan. Kebijakan ekonomi pertahanan yang mempertimbangkan aspek perilaku, konflik, dan ambiguitas peran akan memastikan bahwa sektor ini tidak hanya menjadi pilar keamanan nasional tetapi juga motor penggerak pembangunan ekonomi yang inklusif. Melalui pendekatan ini, pemerintah dapat memaksimalkan manfaat ekonomi pertahanan sambil menjaga keseimbangan antara kebutuhan nasional yang strategis dan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrianto, A. (2023). Analisis Potensial dan Peluang Pengembangan Wilayah dalam Kerangka Pembentukan Daerah Otonomi Baru. *Management and Accounting Research Statistics*, 3(2), 26–45.
- Ali, I. M., Yudho, L., & Sianturi, D. (2021). Strategi Pertahanan Laut Dalam Menghadapi Ancaman Keamanan Maritim di Wilayah Laut Indonesia. *Jurnal Prodi Strategi Pertahanan Laut*, 6(2), 169–188. <https://setkab.go.id/pidato->
- Amarilia, I. O., Anu, S., Ainie, R., Inzany, R., Muh, A., & Ranggong, A. (2023). Kesiapan Pt Pindad Dalam Memproduksi Alutsista Guna Mewujudkan Kemandirian Industri Pertahanan. *Journal of Creative Student Research (JCSR)*, 1(2), 58–72.
- Ariani, R. A., Saputro, G. E., & Prakoso, L. Y. (2023). Peran Ekonomi Dalam Meningkatkan Kemandirian Pertahanan Negara Melalui Konsep Sishankamrata. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(1), 379–383.
- Arsy Ash Shiddiqy, M., Akmal Latif, S., Kurniawansyah, D., Islam Riau, U., & Pasir Pengaraian, U. (2024). *Interdependence of the Indonesian Defense Military Equipment (Study on Medium Tank Joint Production Between Pt. Pindad and Fnss Turkey) Interdependensi Alutsista Pertahanan Indonesia (Studi Pada Joint Production Medium Tank Antara Pt. Pindad Dan Fnss Turki)*. 7, 3691–3704.
- Asyhadi, F., Fattah, S., & Nurdiansyah, W. (2024). implementasi kebijakan pemanfaatan potensi energi baru terbarukan di provinsi sulawesi barat. *Kohesi: Jurnal Sains Dan Teknologi*, 4(9), 1–17.
- Carter, J., Ondercin, H. L., & Palmer, G. (2021). Guns, Butter, and Growth: The Consequences of Military Spending Reconsidered. *Political Research Quarterly*, 74(1), 148–165. <https://doi.org/10.1177/1065912919890417>
- Dzikri, I. (2016). Negara dan Kapasitas Adopsi Inovasi: Studi Kasus Tranformasi Pertahanan Indonesia Periode 1998-2014. *Global: Jurnal Politik Internasional*, 18(2), 131. <https://doi.org/10.7454/global.v18i2.305>

- Ghozali, I., Chandra, V., Ayrul, F., Rachma, I., Ayu, N., & Nur, A. (2024). Analisis Korelasi Antara Kesejahteraan Ekonomi dan Keamanan Nasional Dalam Konteks Strategi Nasional. *Journal Economic Excellence Ibnu Sina*, 2(2), 10–17. <https://doi.org/10.59841/excellence.v2i2.1285>
- Irwanto, A. (2023). *Ekonomi Indonesia Kini dan Esok*. Unhas Press.
- Nurhuda, N., Widjayanto, J., & Prakoso, L. Y. (2021). strategi mencegah munculnya eksekutif negatif pasca pembentukan komponen cadangan di indonesia. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(2), 25–32.
- Pambudhi, N. A. (2024). Analisis Pembangunan Ibukota Negara Baru dan Dampaknya Terhadap Anggaran Pertahanan. *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(1), 70–79.
- Pamungkas, D. Y., Siregar, P., & Prapsetyo, A. (2024). Pemberdayaan Industri Strategis Pertahanan Untuk Mendukung Pembangunan Kekuatan Pokok Minimum Tni. *Jurnal Teknik Sipil Pertahanan*, 11(2), 121–138.
- Prihantoro, M., & Swastanto, Y. (2021). Penanganan Pandemi Covid-19 Oleh Pemerintah Ri Ditinjau Dari Strategi Pertahanan Nirmiliter. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 11(1), 31–48. <https://doi.org/10.33172/jpbh.v11i1.1149>
- Putra, H. C., & Kandar, I. (2022). Konsep Pengelolaan Keuangan Negara Dan Barang-Barang Publik. *Jurnal Administrasi Publik Dan Kebijakan (Japk)*, 2(2), 57–73.
- Putri, C. A., Noviantini, E. F., Ramadhani, F. N., & Fadilla, A. (2024). Peran APBN dalam Meningkatkan Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah di Indonesia. *Journal of Regional Economics and Development*, 1(3), 1–9.
- Rusdiana, D., Ali, Y., Thamrin, S., & Widodo, R. (2021). Strategi Pembangunan Industri Pertahanan Pada Negara Kepulauan Guna Mendukung Pertahanan Negara. *Jurnal Academia Praja*, 4(2), 427–440. <https://doi.org/10.36859/jap.v4i2.629>
- Saifuddin, R. (2021). Pengaruh Pandemi Terhadap Tata Kelola Pemerintahan; Studi Kasus Pelayanan Publik Pemerintah Provinsi Lampung Influence of Pandemic on Governance; Case Study of Lampung Province Government Public Services. *Innovasi Pembangunan: Jurnal Kelitbangan*, 9(3), 1–22.
- Susdarwono, E. T., & Anis, A. (2020). Potensi Industri Bregasmalang – Petanglong Dalam Mendukung Terciptanya Klaster Pendukung Dan Bahan Baku Industri Pertahanan Indonesia. *Jurnal Litbang Kota Pekalongan*, 18(1), 36–55. <https://doi.org/10.54911/litbang.v18i0.118>
- Wahyuningsi, andi sri, Kafrawi, A., & Paramita, A. (2024). peran strategis pengeluaran pariwisata, infrastruktur dan pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah mamminasata. *Bulletin of Economic Studies*, 4(2), 109–129.